

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Selamat Tinggal Reklamasi

### Anies Cabut Izin 13 Pulau di Jakarta

JAKARTA—Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menghentikan semua proyek reklamasi di wilayah Jakarta. Penghentian reklamasi ini adalah bagian dari janji kampanye Anies saat Pilgub DKI 2017 lalu. Langkah tersebut diawali dengan menarik pembahasan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWPJK) serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKS Pantura) bersama DPRD DKI pada Desember 2017.

"Kami mencabut semua izin proyek reklamasi di 13 pulau, yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah sebelumnya," tegas Anies Baswedan di kantornya, Jakarta, Rabu (26/9). Anies mengatakan, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) 58 Tahun 2018, Badan Pengelolaan Pulau Reklamasi bertugas melakukan verifikasi dokumen perizinan proyek reklamasi di 13 pulau di Jakarta. Dari hasil verifikasi tersebut disimpulkan pencabutan izin reklamasi terhadap 13 pulau.

"Sejak hari ini (kemarin, Red) semua kegiatan reklamasi dihentikan atau ditutup. Reklamasi itu bagian sejarah dari Jakarta, tapi bukan kegiatan masa depan Jakarta," ungkap Anies.

"Selanjutnya, langkah yang akan kita lakukan adalah menyelesaikan Perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil," imbuhnya.

Lebih jauh Anies menuturkan, Pemprov DKI akan fokus pada pemulihan wilayah teluk Jakarta terutama pada aspek perbaikan kualitas air sungai, pelayanan air bersih, pengolahan limbah, dan antisipasi land subsidence. Untuk pulau yang sudah terbangun saat ini sedang ada monitoring dampak pembangunan pulau reklamasi terhadap pantai utara.

"Kami selanjutnya akan memberikan rekomendasi perubahan bentuk serta rehabilitasi pemulihan pantai utara Jakarta. Dan tata ruang bagi pulau-pulau yang sudah jadi akan diatur dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat," terang Anies.

Anies menyebutkan, pihak-

pihak perusahaan-perusahaan yang dulu belum melakukan reklamasi tapi sudah memberikan kontribusi tambahan seperti rumah susun, jalan inspeksi, sarana prasarana lain, maka akan diperhitungkan sebagai aset. Apabila di kemudian hari mereka akan melakukan pembangunan, maka akan diperhitungkan dan apabila mereka memerlukan kontribusi tambahan, maka itu bisa diperhitungkan.

"Ini salah satu contoh bahwa belum apa-apa, sudah ada kontribusi tambahan padahal belum dijalankan, itu nanti kita semua akan catat," ucapnya.

Anies mengaku bersyukur salah satu proyek besar untuk menyelamatkan pantai utara Jakarta dan teluk Jakarta bisa dituntaskan. (mas)



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Selamat Tinggal Reklamasi

**13**  
PULAU REKLAMASI  
DIHENTIKAN

Pulau	PT	Luas (ha)
Pulau A	PT Kapuk Naga Indah	79
Pulau B	PT Kapuk Naga Indah	380
Pulau E	PT Kapuk Naga Indah	284
Pulau I	PT Pembangunan Jaya Ancol	405
Pulau J	PT Pembangunan Jaya Ancol	316
Pulau K	PT Pembangunan Jaya Ancol	32
Pulau M	PT Manggala Krida Yudha	582
Pulau O	PT Jakarta Propertindo	344
Pulau F	PT Jakarta Propertindo	190
Pulau P	KEK Marunca Jakarta	463
Pulau Q	KEK Marunca Jakarta	389
Pulau R	PT Taman Harapan Indah	63
Pulau T	PT Manggala Krida Yudha	481

\*Diolah dari berbagai sumber